

PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS

2021

PERANRI NO. 5, BN 2021 (758), 49 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS

- ABSTRAK
- : - Tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; Pedoman umum tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan;
 - Dasar hukum peraturan ANRI ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Keppres No. 103 Tahun 2001, No. 71 Tahun 2019, Perpres No. 95 Tahun 2018;
 - Dalam Peraturan ANRI ini diatur tentang Penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah yang meliputi jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas; pembuatan Naskah Dinas; pengamanan Naskah Dinas; pejabat penandatanganan Naskah Dinas; dan pengendalian Naskah Dinas.

- CATATAN
- : - Peraturan ANRI ini ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2021.
 - Peraturan ANRI ini diundangkan pada tanggal 1 Juli 2021.
 - Lampiran 65 halaman.